



**MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PRAKTEKNYA:
ANALISIS KOMPARATIF TEORI RASIONAL DAN TEORI INKREMENTAL
DI INDONESIA**

**Yunitawati¹, Zahraini², Januar Pandapotan³, Fatimah Zohra⁴, Saiful Bahri⁵,
Munawar^{6*}**

Magister Administrasi Pendidikan, Pasca Sarjana

Universitas Almuslim – Aceh^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: yunitawati523@gmail.com¹, zahrainireni09@gmail.com²,
januar.panjaitan@gmail.com³, fatimahzohra337@gmail.com⁴, saifulbahri@umuslim.ac.id⁵,
munawar@umuslim.ac.id⁶

Diterima: 29/09/2026; Direvisi: 08/10/2026; Diterbitkan: 21/10/2026

ABSTRAK

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan proses strategis yang menentukan arah, prioritas, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan tidak selalu dirumuskan melalui satu pendekatan tunggal karena proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh ketersediaan data, kapasitas kelembagaan, dinamika aktor, serta kondisi implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif teori rasional dan teori inkremental serta menjelaskan relevansi keduanya dalam praktik perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui *integrative literature review* dan analisis isi komparatif. Data diperoleh dari 15 artikel ilmiah yang ditelusuri melalui Google Scholar dan diseleksi berdasarkan relevansi topik, kelayakan isi, serta keterkaitan dengan model perumusan kebijakan pendidikan. Proses seleksi literatur mengadaptasi tahapan PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Data dianalisis menggunakan analisis isi komparatif untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis karakteristik, keunggulan, keterbatasan, serta penerapan teori rasional dan inkremental dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rasional lebih dominan dalam menjelaskan proses formulasi yang sistematis melalui penggunaan data, penetapan tujuan, penyusunan alternatif, serta perencanaan yang terukur. Sebaliknya, model inkremental lebih kuat dalam menjelaskan praktik pengambilan keputusan yang bertahap, fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap keterbatasan sumber daya serta dinamika implementasi. Temuan juga menunjukkan bahwa praktik kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung memperlihatkan kombinasi antara rasionalitas pada tahap perencanaan dan penyesuaian inkremental pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian, kedua model tidak diposisikan sebagai pendekatan yang saling meniadakan, tetapi sebagai perspektif yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *Analisis Kebijakan, Pendidikan Indonesia, Perumusan Kebijakan Pendidikan, Teori Inkremental, Teori Rasional.*

ABSTRACT

Educational policy formulation is a strategic process that determines the direction, priorities, and mechanisms of education governance. In practice, educational policies are not always formulated through a single approach because decision making is influenced by data availability, institutional capacity, actor dynamics, and implementation conditions. This study

aims to comparatively analyze rational and incremental theories and to explain their relevance to educational policy formulation practices in Indonesia. The study employed a qualitative approach using an integrative literature review and comparative content analysis. Data were drawn from 15 scholarly articles identified through Google Scholar and selected based on topic relevance, content eligibility, and their relationship to educational policy formulation models. The literature selection process adapted the PRISMA stages of identification, screening, eligibility assessment, and inclusion. The data were analyzed using comparative content analysis to identify, compare, and synthesize the characteristics, strengths, limitations, and applications of rational and incremental theories in educational policy formulation in Indonesia. The findings show that the rational model is more dominant in explaining systematic policy formulation through the use of data, explicit goal setting, identification of alternatives, and measurable planning. In contrast, the incremental model is more effective in explaining gradual, flexible, adaptive, and context responsive decision making under conditions of limited resources and implementation dynamics. The findings further indicate that educational policy practice in Indonesia tends to combine rationality at the planning stage with incremental adjustment during implementation. Therefore, the two models should not be viewed as mutually exclusive approaches, but as complementary perspectives for understanding the complexity of educational policy formulation in Indonesia.

Keywords: *Educational Policy Formulation, Incremental Theory, Indonesian Education, Rational Theory, Policy Analysis.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis yang menentukan arah penyelenggaraan pendidikan karena di dalamnya terdapat keputusan mengenai tujuan, kurikulum, pengelolaan sumber daya, pemerataan akses, pembiayaan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah dan satuan pendidikan (Hadiyani et al., 2025; Kholifah et al., 2024). Perumusan kebijakan menjadi tahap yang penting karena keputusan yang ditetapkan pada tahap tersebut akan memengaruhi bentuk program, mekanisme implementasi, penggunaan sumber daya, serta kemampuan sistem pendidikan dalam merespons persoalan yang muncul pada tingkat nasional maupun daerah (Arif et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, perumusan kebijakan pendidikan menjadi kompleks karena penerapan sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Sofiani et al. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan menghadapi tantangan berupa kesenjangan mutu antardaerah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala birokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan Pendidikan.

Desentralisasi pendidikan telah memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah (Bandur et al., 2022). Penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan kepada tingkat sekolah dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen pemangku kepentingan serta mendukung perbaikan lingkungan pembelajaran apabila disertai dengan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan yang memadai (Bandur et al., 2022). Namun demikian, reformasi melalui desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan hasil pendidikan karena variasi

kapasitas pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi kelembagaan tetap memengaruhi hasil kebijakan yang diterapkan (Dewi, 2021).

Kajian mengenai reformasi kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan belum selalu menghasilkan peningkatan hasil belajar yang signifikan (Dewi, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara rancangan kebijakan yang disusun berdasarkan tujuan tertentu dengan hasil aktual yang muncul setelah kebijakan diterapkan di berbagai daerah dan satuan pendidikan (Dewi, 2021). Studi mengenai desentralisasi pendidikan pada madrasah juga menemukan bahwa otonomi memberikan peluang munculnya variasi dan inovasi kelembagaan, tetapi persoalan pendanaan, kualitas tenaga pendidikan, dan kapasitas institusi masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan kebijakan secara optimal (Kultsum et al., 2022).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa proses kebijakan pendidikan tidak selalu dapat dipahami sebagai proses teknis yang berlangsung secara linier dari identifikasi masalah menuju pemilihan solusi terbaik. Model rasional memandang perumusan kebijakan sebagai proses sistematis yang menekankan kejelasan tujuan, penggunaan informasi, identifikasi alternatif, analisis konsekuensi, serta pemilihan alternatif yang dinilai paling sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Pendekatan tersebut memiliki daya tarik dalam pengelolaan pendidikan karena memberikan dasar yang terstruktur bagi pemerintah untuk menghubungkan masalah, data, tujuan, program, dan hasil yang diharapkan dalam suatu proses keputusan (Kholifah et al., 2024).

Meskipun model rasional menawarkan kerangka pengambilan keputusan yang sistematis, praktik kebijakan publik sering berlangsung dalam kondisi informasi yang terbatas, kepentingan yang beragam, kapasitas kelembagaan yang berbeda, serta tekanan politik yang membatasi kemungkinan untuk menilai seluruh pilihan secara menyeluruh (Adam et al., 2022). Kajian kontemporer mengenai inkrementalisme menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang bertahap tetap memiliki relevansi ketika arena pengambilan keputusan semakin terfragmentasi dan kebijakan yang harus dikelola semakin kompleks (Adam et al., 2022). Dalam kondisi tersebut, keputusan sering berkembang melalui akumulasi penyesuaian terhadap kebijakan yang telah berjalan daripada melalui perubahan menyeluruh yang dirancang kembali dari awal (Adam et al., 2022).

Fenomena perubahan dan penyesuaian kebijakan tersebut dapat ditemukan pada berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia (Sulistiyosari et al., 2023). Kebijakan penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi, misalnya, dirancang untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, tetapi implementasinya memperlihatkan persoalan mengenai ketersediaan daya tampung sekolah, perbedaan pemahaman para pelaksana, dan konsekuensi yang tidak selalu sesuai dengan tujuan awal kebijakan (Sulistiyosari et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang mempunyai tujuan rasional mengenai pemerataan pendidikan tetap membutuhkan penyesuaian ketika berhadapan dengan variasi kapasitas dan kondisi aktual pada tingkat daerah (Sulistiyosari et al., 2023).

Dinamika serupa terlihat dalam penerapan Kurikulum Merdeka sebagai salah satu reformasi pendidikan nasional yang memberikan ruang lebih besar bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Lestari et al., 2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada tingkat sekolah masih menghadapi variasi pemahaman, kesiapan guru, kapasitas institusi, serta kemampuan sekolah dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi praktik pembelajaran yang efektif (Lestari et al., 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak

hanya ditentukan oleh kualitas rancangan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aktor pelaksana untuk menafsirkan, menyesuaikan, dan mengoperasionalkan kebijakan sesuai konteks masing masing satuan pendidikan (Lestari et al., 2023).

Peran aktor dan konteks lokal juga terlihat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan di Aceh yang memperlihatkan bahwa kebijakan tidak terbentuk melalui pertimbangan teknokratis semata (Hafni & Aiyub, 2021). Penelitian mengenai formulasi kurikulum berbasis nilai Islam di Aceh menemukan adanya persoalan sinergi antaraktor serta perbedaan pemaknaan kebijakan di antara lembaga yang terlibat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan (Hafni & Aiyub, 2021). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan pendidikan juga merupakan arena interaksi kelembagaan yang melibatkan kepentingan, kewenangan, interpretasi, serta kemampuan aktor dalam mencapai kesepahaman mengenai substansi kebijakan (Hafni & Aiyub, 2021).

Variasi kapasitas politik dan birokrasi daerah turut menentukan bagaimana kebijakan pendidikan berkembang dalam sistem desentralisasi Indonesia (Arif et al., 2025). Studi komparatif terhadap beberapa pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan pembelajaran dipengaruhi oleh hubungan antara kepemimpinan politik, kapasitas birokrasi, dan struktur kelembagaan yang membatasi atau memungkinkan penggunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan pendidikan (Arif et al., 2025). Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa proses kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami hanya melalui asumsi adanya pengambil keputusan yang sepenuhnya rasional karena keputusan pendidikan selalu berada dalam lingkungan politik dan kelembagaan tertentu (Arif et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah memberikan penjelasan penting mengenai desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah, reformasi kurikulum, kebijakan zonasi, kapasitas birokrasi, serta keterlibatan aktor dalam formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Indonesia (Bandur et al., 2022; Dewi, 2021; Hafni & Aiyub, 2021; Sulistyosari et al., 2023). Kajian mengenai model perumusan kebijakan pendidikan juga telah mengidentifikasi model rasional dan model inkremental sebagai dua pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami proses pengambilan keputusan pendidikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masalah yang dihadapi (Kholifah et al., 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut membahas model perumusan kebijakan secara konseptual atau mengkaji kasus kebijakan tertentu secara terpisah sehingga hubungan antara logika rasional dan logika inkremental dalam praktik kebijakan pendidikan Indonesia belum banyak dianalisis secara komparatif dalam satu kerangka pembahasan yang terpadu (Arif et al., 2025; Kholifah et al., 2024).

Celah penelitian tersebut menjadi penting karena praktik kebijakan pendidikan Indonesia memperlihatkan bahwa orientasi rasional dan inkremental tidak selalu hadir sebagai dua pilihan yang sepenuhnya terpisah (Adam et al., 2022; Kholifah et al., 2024). Kebijakan dapat dirumuskan melalui tujuan, data, indikator, dan perencanaan yang menunjukkan karakter rasional, tetapi proses penerapan dan pengembangannya dapat berlangsung melalui penyesuaian bertahap sebagai respons terhadap kapasitas kelembagaan, dinamika politik, kebutuhan daerah, serta hasil pelaksanaan kebijakan sebelumnya (Adam et al., 2022; Arif et al., 2025). Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menjelaskan kelebihan dan keterbatasan masing masing model, tetapi juga membandingkan kemampuan kedua teori tersebut dalam menjelaskan praktik kebijakan pendidikan Indonesia (Kholifah et al., 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori rasional dan teori inkremental secara komparatif untuk membaca pola perumusan dan perkembangan kebijakan pendidikan Indonesia berdasarkan temuan penelitian empiris mutakhir mengenai desentralisasi, kurikulum,

penerimaan peserta didik, manajemen berbasis sekolah, kapasitas birokrasi, serta keterlibatan aktor kebijakan (Arif et al., 2025; Bandur et al., 2022; Sulistyosari et al., 2023). Kajian ini tidak menempatkan model rasional dan model inkremental sebagai konsep yang hanya dibandingkan pada tingkat definisi, tetapi menggunakannya sebagai perspektif analitis untuk menjelaskan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaannya dalam sistem pendidikan Indonesia (Adam et al., 2022; Dewi, 2021). Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai kemungkinan interaksi antara perencanaan rasional dan penyesuaian inkremental dalam proses kebijakan pendidikan nasional (Arif et al., 2025; Kholifah et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang, kajian terdahulu, dan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif karakteristik teori rasional dan teori inkremental serta menjelaskan relevansi kedua teori tersebut dalam memahami praktik perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia (Adam et al., 2022; Kholifah et al., 2024). Analisis difokuskan pada dasar pengambilan keputusan, penggunaan informasi, penetapan alternatif, pola perubahan kebijakan, keterlibatan aktor, serta hubungan antara rancangan kebijakan dengan dinamika implementasinya dalam konteks pendidikan Indonesia (Arif et al., 2025; Hafni & Aiyub, 2021).

METODE PENELITIAN

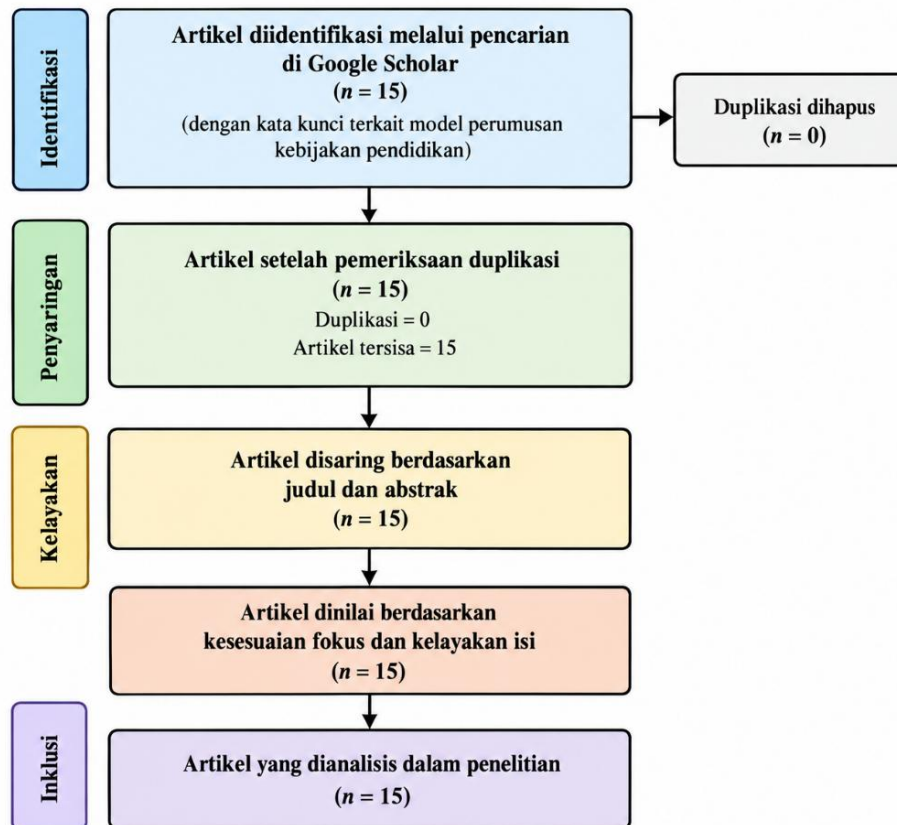
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui *integrative literature review* dan analisis isi komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai penelitian mengenai model perumusan kebijakan pendidikan, khususnya teori rasional dan teori inkremental serta penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Integrative literature review memungkinkan peneliti mengkritisi dan menyintesis temuan empiris serta literatur konseptual untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan mengembangkan perspektif teoretis baru. Snyder (2019) menegaskan bahwa pendekatan ini sesuai untuk mengintegrasikan beragam perspektif dalam suatu topik, dengan proses pemilihan dan analisis literatur yang transparan serta sistematis agar menghasilkan sintesis yang bermakna, bukan sekadar rangkuman penelitian terdahulu.

Sumber data penelitian berupa artikel ilmiah yang ditelusuri melalui Google Scholar. Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci “model perumusan kebijakan pendidikan”, “perumusan kebijakan pendidikan”, “teori rasional kebijakan pendidikan”, “teori inkremental kebijakan pendidikan”, “analisis kebijakan pendidikan”, “formulasi kebijakan pendidikan”, dan “pengambilan keputusan pendidikan”. Artikel diprioritaskan pada publikasi tahun 2020 sampai 2025 agar hasil kajian merepresentasikan perkembangan penelitian kebijakan pendidikan yang relatif mutakhir.

Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas model perumusan kebijakan pendidikan, teori rasional, teori inkremental, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan pendidikan, atau praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. Artikel juga harus memiliki abstrak atau teks lengkap yang dapat diperiksa serta identitas publikasi yang dapat diverifikasi melalui laman jurnal. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, tidak dapat diverifikasi sumber penerbitannya, berupa duplikasi, atau tidak menyediakan informasi yang memadai untuk proses analisis tidak dimasukkan dalam kajian.

Berdasarkan korpus awal yang diperoleh dari penelusuran Google Scholar dan dikumpulkan dalam penelitian ini, sebanyak 15 artikel diidentifikasi sebagai kandidat utama. Artikel tersebut selanjutnya diperiksa berdasarkan judul, abstrak, fokus penelitian, metode,

serta keterkaitannya dengan model perumusan kebijakan pendidikan. Proses seleksi literatur disusun dengan mengadaptasi alur PRISMA yang meliputi tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi (Page et al., 2021). Penggunaan alur PRISMA dalam kajian pendidikan juga tampak pada penelitian Khairul dan Saminan (2025), yang menggabungkan penyaringan literatur secara sistematis dengan analisis isi untuk membangun sintesis konseptual.



Gambar 1. Diagram alur seleksi artikel berdasarkan PRISMA

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi komparatif. Setiap artikel diekstraksi berdasarkan nama penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode, konteks penelitian, temuan utama, serta karakter model kebijakan yang dibahas. Artikel kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu model rasional dan model inkremental. Karakter model rasional diidentifikasi melalui penggunaan data, tujuan yang jelas, penyusunan alternatif, analisis konsekuensi, dan proses perencanaan yang sistematis. Karakter model inkremental diidentifikasi melalui perubahan kebijakan secara bertahap, penggunaan kebijakan sebelumnya sebagai dasar keputusan, penyesuaian terhadap kondisi aktual, fleksibilitas, serta proses kompromi dalam pengambilan keputusan.

Tahap akhir dilakukan melalui sintesis komparatif dengan membandingkan persamaan, perbedaan, keunggulan, keterbatasan, serta bentuk penerapan teori rasional dan inkremental dalam berbagai praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. Hasil sintesis digunakan untuk menjelaskan sejauh mana kedua teori tersebut mampu menggambarkan proses perumusan dan pengambilan keputusan pendidikan dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan proses seleksi literatur melalui Google Scholar dengan alur PRISMA, diperoleh 15 artikel yang relevan dengan tema model perumusan kebijakan pendidikan, teori rasional, teori inkremental, serta praktik pengambilan keputusan pendidikan di Indonesia. Artikel yang terpilih terdiri atas kajian konseptual, studi literatur, dan sejumlah penelitian empiris pada tingkat sekolah. Temuan dari 15 artikel tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh kajian teoretis, sementara kajian empiris yang secara langsung menelaah penerapan model rasional dan inkremental di lapangan relatif masih terbatas.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Telaah 15 Artikel

No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
1.	Kholifah et al. (2024)	Model perumusan kebijakan pendidikan	Studi literatur	Model perumusan kebijakan pendidikan terdiri atas tujuh model, yaitu kelembagaan, sistem, rasional, inkremental, penyelidikan campuran, proses, dan teori elit.
2.	Nurhakim et al. (2025)	Perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan	<i>Literature review</i>	Perumusan masalah, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara sistematis, adaptif, demokratis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3.	Putri et al. (2025)	Dinamika perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia	Artikel konseptual	Agenda <i>setting</i> , aktor, dan pendekatan kebijakan sangat menentukan legitimasi dan arah kebijakan pendidikan di Indonesia.
4.	Fathoni et al. (2025)	Teori dan model analisis kebijakan pendidikan	<i>Library research</i>	Model rasional, model sistem, dan model CIPP relevan untuk memahami kompleksitas analisis kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam.
5.	Ambarwati et al. (2024)	Perumusan masalah kebijakan, alternatif, dan rekomendasi kurikulum	Studi literatur	Perumusan masalah, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan merupakan unsur penting yang saling memengaruhi pengambilan keputusan pendidikan.
6.	Herwani (2025)	Perumusan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia	Artikel konseptual	Formulasi kebijakan pendidikan harus didasarkan pada agenda <i>setting</i> , kerangka teoretis, dan

				keterlibatan aktor agar memiliki legitimasi dan arah yang jelas.
7.	Hajaroh et al. (2021)	Difusi model perumusan kebijakan Sekolah Ramah Anak	<i>Mixed methods</i>	Model perumusan kebijakan Sekolah Ramah Anak efektif sebagai inovasi dan berhasil diadopsi sekolah melalui kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat.
8.	Hidayat et al. (2025)	Transformasi analisis kebijakan, model, tahapan, dan implementasinya	Artikel tinjauan	Model rasional, inkremental, dan <i>mixed scanning</i> mempunyai keunggulan berbeda sesuai konteks pengelolaan pendidikan modern.
9.	Iskandar (2022)	Transformasi model kebijakan dan perencanaan strategis	Studi literatur	Sistem pendidikan memerlukan transformasi model kebijakan dan perencanaan strategis yang mempertimbangkan model rasional, inkremental, dan perencanaan komprehensif.
10.	Sadiyah et al. (2023)	Faktor fundamental perumusan kebijakan pendidikan	<i>Literatur review</i>	Kebijakan pendidikan harus dirumuskan berdasarkan faktor-faktor fundamental agar mampu menjawab persoalan pendidikan yang berkembang.
11.	Yulfianti et al. (2025)	Peran inkremental kepala sekolah dalam pengambilan keputusan	Kualitatif, analisis dokumen	Pendekatan inkremental efektif untuk meningkatkan fleksibilitas, adaptasi, pembelajaran organisasi, dan legitimasi kepemimpinan sekolah.
12.	Al Fatih dan Amiruddin (2025)	Pembuatan kebijakan dan perencanaan pendidikan di sekolah	Studi kasus kualitatif	Pembuatan kebijakan sekolah berkaitan erat dengan visi, misi, strategi, dan perencanaan pendidikan yang disusun untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
13.	Azmaniar et al. (2025)	Efektivitas model incremental dalam keputusan kepala sekolah	<i>Literature review</i>	Model <i>incremental</i> efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan apabila didukung kompetensi kepala sekolah, partisipasi <i>stakeholder</i> , serta monitoring dan evaluasi.

14. Nazila et al. (2025)	Pendekatan proses dan model-model kebijakan	<i>Library research</i>	Praktik kebijakan di Indonesia cenderung didominasi model <i>incremental</i> , tetapi model rasional, <i>mixed scanning</i> , dan model lain tetap relevan tergantung konteks.
15. Tobondo dan Tudjuka (2024)	Tinjauan literatur model analisis kebijakan pendidikan	Studi pustaka kualitatif	Model rasional efektif untuk hasil yang terukur, tetapi model kompleks dan partisipatif lebih responsif terhadap konteks pendidikan Indonesia yang beragam.

1. Karakteristik Umum Literatur yang Ditelaah

Hasil telaah menunjukkan bahwa dari 15 artikel yang dianalisis, sebagian besar merupakan studi kepustakaan atau artikel konseptual. Artikel seperti Fathoni et al. (2025), Hidayat et al. (2025), Iskandar (2022), Kholifah et al. (2024), Nazila et al. (2025), Nurhakim et al. (2025), Sadiyah et al. (2023), dan Tobondo dan Tudjuka (2024) menekankan aspek teoretis dan normatif kebijakan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai model perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia masih banyak diarahkan pada penjelasan konseptual tentang tahapan, pendekatan, dan model kebijakan, sementara kajian yang secara langsung menguji model tersebut pada praktik kebijakan nyata masih terbatas.

Di sisi lain, artikel empiris yang lebih dekat dengan praktik kebijakan hanya ditemukan pada beberapa penelitian, seperti Al Fatih dan Amiruddin (2025), Hajaroh et al. (2021), dan Yulfianti et al. (2025). Ketiga artikel ini penting karena memberikan gambaran bahwa teori kebijakan tidak hanya berhenti pada formulasi konsep, tetapi juga digunakan dalam konteks nyata pengambilan keputusan di sekolah. Dengan demikian, literatur yang dianalisis menunjukkan adanya ketimpangan antara dominasi kajian teoretis dan keterbatasan studi praktik.

2. Temuan Utama Mengenai Teori Rasional

Berdasarkan hasil analisis, teori rasional dipahami sebagai model yang menekankan kejelasan tujuan, penggunaan data, identifikasi masalah secara sistematis, penentuan alternatif kebijakan, dan pemilihan keputusan yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Pandangan ini tampak kuat pada kajian Fathoni et al. (2025), Hidayat et al. (2025), Iskandar (2022), Kholifah et al. (2024), dan Tobondo dan Tudjuka (2024). Dalam perspektif ini, perumusan kebijakan dipahami sebagai proses yang ideal, logis, dan terstruktur.

Kecenderungan rasional juga tampak pada pembahasan tentang formulasi masalah kebijakan dan penyusunan alternatif kebijakan. Ambarwati et al. (2024) menunjukkan bahwa proses perumusan masalah, penyusunan alternatif, dan pemberian rekomendasi kebijakan merupakan fondasi utama dalam memengaruhi perkembangan kurikulum pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang baik memerlukan urutan berpikir yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, artikel Nurhakim et al. (2025) menegaskan bahwa formulasi dan adopsi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara sistematis agar kebijakan yang dihasilkan relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dengan demikian, model rasional

memiliki keunggulan dalam memberikan arah yang jelas, legitimasi ilmiah, serta dasar analisis yang lebih terukur dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Namun, hasil telaah juga menunjukkan bahwa model rasional mempunyai keterbatasan ketika diterapkan dalam situasi pendidikan yang kompleks. Tobondo dan Tudjuka (2024) menilai bahwa model rasional memang efektif untuk menghasilkan keputusan yang terukur, tetapi kurang memadai ketika harus menghadapi ketimpangan lokal, keragaman konteks, dan dinamika sosial politik pendidikan di Indonesia. Artinya, model rasional kuat pada tataran ideal dan perencanaan, tetapi belum tentu selalu efektif ketika berhadapan dengan situasi nyata yang berubah-ubah.

3. Temuan Utama Mengenai Teori Inkremental

Berbeda dengan teori rasional yang menekankan perencanaan sistematis, teori inkremental lebih menekankan perubahan bertahap, penyesuaian terhadap kondisi aktual, dan keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman sebelumnya. Temuan ini paling jelas terlihat dalam artikel Azmaniar et al. (2025) dan Yulfianti et al. (2025) yang secara khusus menyoroti pendekatan incremental dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. Yulfianti et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan inkremental efektif diterapkan di sekolah karena memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan adaptif terhadap ketidakpastian. Pendekatan ini juga membantu sekolah meminimalkan risiko perubahan yang terlalu besar dan sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan. Dalam praktiknya, perubahan yang dilakukan melalui langkah kecil dinilai lebih realistis bagi organisasi sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya, tuntutan yang terus berubah, dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas internal.

Temuan serupa juga diperoleh Azmaniar et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa model incremental sering efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama apabila kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang baik dan didukung oleh partisipasi stakeholder serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Hasil ini memperlihatkan bahwa model inkremental tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mempunyai relevansi praktis dalam konteks pengelolaan sekolah. Nazila et al. (2025) bahkan menyatakan bahwa praktik kebijakan di Indonesia pada umumnya lebih banyak didominasi oleh model incremental. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi nyata, pengambilan keputusan pendidikan lebih sering berlangsung melalui penyesuaian bertahap dibandingkan melalui perubahan besar yang sepenuhnya baru. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan Indonesia cenderung berkembang melalui proses adaptasi dan modifikasi berkelanjutan.

4. Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Studi yang menyoroti praktik kebijakan secara langsung menunjukkan bahwa teori kebijakan tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam proses kebijakan. Hajaroh et al. (2021), misalnya, menunjukkan bahwa model perumusan kebijakan Sekolah Ramah Anak diadopsi sekolah melalui proses difusi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada desain formal kebijakan, tetapi juga pada kemampuan aktor pendidikan untuk menerjemahkan kebijakan makro dan meso ke dalam kebijakan mikro pada tingkat satuan pendidikan.

Pada tingkat sekolah, Al Fatih dan Amiruddin (2025) menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan dan perencanaan pendidikan di SMKN 1 Percut Sei Tuan berkaitan erat dengan visi, misi, strategi, dan tujuan pendidikan. Hasil ini menunjukkan adanya unsur rasional dalam

bentuk perencanaan yang sistematis. Namun, dalam implementasinya, kebijakan sekolah tetap bergantung pada kondisi internal sekolah, sehingga membuka ruang bagi penyesuaian yang bersifat inkremental. Temuan praktik ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia umumnya tidak murni rasional dan tidak pula sepenuhnya inkremental. Kebijakan sering dirancang dengan kerangka rasional pada tingkat tujuan, program, dan perencanaan, tetapi dilaksanakan secara inkremental melalui penyesuaian bertahap, kompromi, dan adaptasi sesuai situasi lembaga pendidikan. Pola ini menjelaskan bahwa praktik kebijakan di Indonesia lebih realistis dipahami sebagai kombinasi antara orientasi rasional dan pendekatan inkremental.

5. Analisis Komparatif Teori Rasional dan Teori Inkremental

Hasil komparasi dari 15 artikel menunjukkan bahwa teori rasional dan teori inkremental memiliki perbedaan mendasar dalam cara memandang proses kebijakan pendidikan. Teori rasional menempatkan kebijakan sebagai hasil dari proses analitis yang sistematis, terencana, dan berbasis tujuan yang jelas. Sementara itu, teori inkremental melihat kebijakan sebagai hasil dari proses perubahan bertahap yang disesuaikan dengan kondisi nyata, keterbatasan organisasi, dan pengalaman kebijakan sebelumnya.

Tabel 2. Perbandingan Teori Rasional dan Teori Inkremental dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek	Teori Rasional	Teori Inkremental
Dasar pengambilan keputusan	Data, analisis, tujuan, dan alternatif.	Pengalaman sebelumnya, situasi aktual, dan penyesuaian bertahap.
Orientasi kebijakan	Sistematis dan komprehensif.	Bertahap, adaptif, dan pragmatis.
Pola perubahan	Dapat bersifat menyeluruh.	Perubahan kecil dan berkesinambungan.
Kelebihan	Jelas, terukur, terencana.	Fleksibel, realistis, dan minim risiko.
Kelemahan	Kurang lentur terhadap konteks dinamis.	Kurang mendorong perubahan besar.
Relevansi di Indonesia	Kuat pada tataran perencanaan dan formulasi.	Kuat pada tataran praktik dan implementasi.

Secara komparatif, teori rasional lebih dominan pada artikel yang membahas model, tahapan formulasi, agenda setting, perencanaan strategis, dan rekomendasi kebijakan. Sebaliknya, teori inkremental lebih dominan pada artikel yang membahas praktik kepemimpinan sekolah, penyesuaian kebijakan, efektivitas keputusan di tingkat satuan pendidikan, dan implementasi yang fleksibel. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua teori tidak harus diposisikan sebagai dua kutub yang saling meniadakan, tetapi dapat dipahami sebagai dua logika kebijakan yang saling melengkapi.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literatur kebijakan pendidikan Indonesia cenderung menempatkan model rasional sebagai kerangka normatif dalam perumusan kebijakan. Hal ini terlihat dari penekanan pada perumusan masalah, agenda setting, identifikasi

alternatif, dan rekomendasi kebijakan sebagaimana ditemukan pada Ambarwati et al. (2024), Kholifah et al. (2024), Nurhakim et al. (2025), dan Putri et al. (2025). Dengan demikian, model rasional berfungsi sebagai dasar konseptual yang memberikan struktur berpikir dan arah analisis kebijakan pendidikan.

Akan tetapi, ketika perhatian diarahkan pada praktik kebijakan di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan, model inkremental tampak lebih dominan. Hal ini terlihat pada penelitian, Azmaniar et al. (2025), Hajaroh et al. (2021), dan Yulfianti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keputusan pendidikan sering harus disesuaikan secara bertahap dengan kondisi lembaga, kemampuan aktor, dan keterlibatan stakeholder. Dalam konteks ini, teori inkremental menjadi lebih realistis karena kebijakan pendidikan di lapangan jarang berjalan sepenuhnya sesuai desain awal.

Dengan demikian, hasil telaah ini menegaskan bahwa praktik kebijakan pendidikan di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai pertemuan antara rasionalitas perencanaan dan inkrementalisme implementasi. Pada tahap formulasi, kebijakan cenderung menggunakan logika rasional agar memiliki legitimasi, arah, dan target yang jelas. Namun, pada tahap pelaksanaan, kebijakan cenderung bergerak secara inkremental agar lebih mudah beradaptasi dengan berbagai keterbatasan dan dinamika lapangan. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia tidak cukup dijelaskan hanya oleh satu model, melainkan memerlukan pembacaan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Selain konsistensi antara formulasi dan implementasi, evaluasi kebijakan perlu menilai efektivitas, kualitas, dan nilai yang dihasilkan program agar penyesuaian kebijakan tidak berhenti pada perubahan administratif semata (Huda et al., 2025).

Berdasarkan seluruh artikel yang dianalisis, terdapat tiga sintesis utama. Pertama, kajian tentang model perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh studi konseptual, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian empiris yang menelaah bagaimana teori kebijakan benar benar bekerja di lapangan. Kedua, teori rasional lebih kuat dalam menjelaskan tahapan formulasi kebijakan yang bersifat sistematis, sedangkan teori inkremental lebih kuat dalam menjelaskan praktik pengambilan keputusan yang adaptif dan bertahap. Ketiga, praktik kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa kedua model tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi sering kali saling melengkapi.

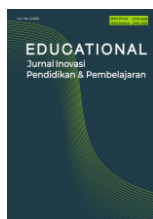
KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa teori rasional dan teori inkremental memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Model rasional lebih kuat dalam menjelaskan proses formulasi yang sistematis melalui penggunaan data, penetapan tujuan, penyusunan alternatif, dan perencanaan yang terukur, sedangkan model inkremental lebih sesuai untuk menjelaskan penyesuaian kebijakan secara bertahap ketika implementasi berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan dinamika aktor. Temuan dari artikel konseptual dan empiris yang ditelaah memperlihatkan bahwa praktik kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung memadukan rasionalitas pada tahap perencanaan dengan penyesuaian inkremental pada tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, kajian kebijakan pendidikan perlu menilai bukan hanya ketepatan desain kebijakan, tetapi juga kemampuan kebijakan untuk beradaptasi, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan sesuai konteks implementasinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C., Hurka, S., Knill, C., & Steinebach, Y. (2022). On democratic intelligence and failure: The vice and virtue of incrementalism under political fragmentation and policy accumulation. *Governance*, 35(2), 525–543. <https://doi.org/10.1111/gove.12595>
- Al Fatih, M., & Amiruddin, A. (2025). Pembuatan kebijakan dan perencanaan pendidikan pada sekolah SMKN 1 Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.A), 25–32. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11295>
- Ambarwati, P., Fathurrohman, N., & Fauzi, A. (2024). Perumusan masalah kebijakan, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan dalam mempengaruhi perkembangan kurikulum pendidikan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1598–1605. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1139>
- Arif, S., Nihayah, R. W., Usman, S., & Rarasati, N. (2025). Does decentralisation promote learning? Local political settlements and education policies in Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 55(6), 992–1010. <https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2344523>
- Azmaniar, Y., Ali, M. M., M., S., & Irsyad. (2025). Efektivitas pengambilan keputusan kepala sekolah dalam penerapan model incremental untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP). *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2048–2057. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/1156>
- Bandur, A., Hamsal, M., & Furinto, A. (2022). 21st century experiences in the development of school based management policy and practices in Indonesia. *Educational Research for Policy and Practice*, 21, 85–107. <https://doi.org/10.1007/s10671-021-09293-x>
- Dewi, A. U. (2021). Curriculum reform in the decentralization of education in Indonesia: Effect on students' achievements. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(1), 158–169. <https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.33821>
- Fathoni, W., Nasution, I. W., Yusup, M., Asiah, N., & Amirudin, A. (2025). Teori dan model analisis kebijakan pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial*, 3(1), 488–496. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2050>
- Hafni, N., & Aiyub, A. (2021). Collaboration of educational actors in formulating integrated curriculum based on Islamic values in Aceh. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 2(1), 20–32. <https://doi.org/10.29103/mspr.v2i1.4975>
- Hadiyani, R., Azis, D., Khairul, M., & Angkasa, M. A. (2025). Peran strategis pendidikan dalam memperkuat integrasi green blue, ekonomi digital dan kreatif untuk pembangunan berkelanjutan. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(3), 639–649. <https://doi.org/10.51878/educational.v5i3.6668>
- Hajaroh, M., Purwastuti, L. A., Rukiyati, & Saptono, B. (2021). Difusi model perumusan kebijakan sekolah ramah anak di kawasan pesisir wisata. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.21831/jk.v4i2.27238>
- Herwani. (2025). Perumusan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 107–118. <https://jutepe-joln.net/index.php/JURDIKAN/article/view/120>
- Hidayat, H., Oktaviani, E. T., Salsabila, Handayani, D., Naldi, F., & Sofia, E. (2025). Transformasi analisis kebijakan, model, tahapan, dan implementasinya dalam pengelolaan pendidikan modern. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(4), 321–330. <https://www.journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/9610>



- Huda, A. A. S., Mulyani, R., & Khairul, M. (2025). Programme evaluation: A primer for effectiveness, quality, and value. *European Journal of Social Work*, 28(5), 1178–1180. <https://doi.org/10.1080/13691457.2025.2507934>
- Iskandar, K. (2022). Transformasi model kebijakan dan perencanaan strategis dalam sistem pendidikan. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 11(2), 236–252. <https://pondokjurnal.uwj.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/view/1741>
- Khairul, M., & Saminan, N. (2025). Beyond technocentrism: A tripartite framework for humanizing AI integrated scientific modeling in climate related geography education. *Equator Science Journal*, 3(2), 89–97. <https://doi.org/10.61142/esj.v3i2.232>
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model perumusan kebijakan pendidikan. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Kultsum, U., Parinduri, M. A., & Karim, A. (2022). Comparative studies between public and private Islamic schools in the era of globalization. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 11(1), 421–430. <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.22182>
- Lestari, N. A. P., Wahyuni, L. T. S., Arnyana, I. P. B., & Dantes, N. (2023). Policy analysis of the implementation of Merdeka Curriculum in elementary school. *International Journal of Elementary Education*, 7(4), 567–575. <https://doi.org/10.23887/ijee.v7i4.64103>
- Nazila, K., Sari, A. R., Mulyana, S., Ridhoansyah, N., & Nasor, M. (2025). Pendekatan proses dan model-model kebijakan. *UNISAN Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(8), 143–154. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/4365>
- Nurhakim, H. Q., Hakim, A. R., Basuki, Rahmat, M., Supiana, & Zakiah, Q. Y. (2025). Perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan. *AL MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(4), 682–696. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i4.2655>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putri, R. M., Fadliyah, H., Suryawijaya, A. A., Yuliarti, R., Eriyani, E., & Basroh, M. A. (2025). Dinamika perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 487–503. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/36235>
- Sadihah, H., Ikhsan, M. N., Rahmah, D. F., & Setiawan, F. (2023). Faktor fundamental perumusan kebijakan pendidikan. *Al Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 11(2), 85–95. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3789706>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan desentralisasi pendidikan serta implementasi dalam pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>



- Sulistiyosari, Y., Wardana, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2023). School zoning and equal education access in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(2), 586–593. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i2.22488>
- Tobondo, Y., & Tadjuka, S. R. P. (2024). Dari rasional ke kompleks: Tinjauan literatur tentang model-model analisis kebijakan pendidikan. *Pandelo'e*, 4(2), 43–51. <https://publikasi.unkrit.ac.id/index.php/Pand/article/view/51>
- Yulfianti, Y., Marlin, Y., Marsidin, S., & Irsyad. (2025). Peran inkriminal kepala sekolah dalam pengambilan keputusan efektif di SMK Negeri 1 Pariaman. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2437–2444. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/1258>